



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

BLUE ECONOMY UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN IKLIM

Anih Sri Suryani

Analis Legislatif Ahli Madya
anih.suryani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam penerapan *blue economy*, Kementerian PPN/Bappenas telah meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia pada agenda utama ASEAN *Blue Economy* Forum 2023 yang dilaksanakan di Belitung, 2 s.d. 4 Juli 2023. Pada forum tersebut dibahas pentingnya *blue economy* sebagai salah satu prioritas kerja sama ASEAN. Mengingat wilayah ASEAN 66% terdiri dari lautan, maka *blue economy* merupakan mesin baru bagi pembangunan ASEAN dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebagai pemimpin Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia memastikan seluruh negara ASEAN memahami dampak pengembangan dan pelaksanaan *blue economy* tersebut.

Konsep *blue economy* berfokus pada pemanfaatan potensi ekonomi yang ada di sektor kelautan dan perikanan, dengan tetap mempertahankan keseimbangan ekosistem laut dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Peluncuran peta jalan tersebut menunjukkan, terutama bagi negara-negara ASEAN, bahwa Indonesia sudah siap dalam penerapan *blue economy*. Peta jalan disusun untuk bisa menyatukan semua aspek dari potensi pengembangan *blue economy* di Indonesia, tidak hanya pada sektor yang sudah ada seperti perikanan tangkap dan budidaya, pariwisata, serta manufaktur berbasis komoditas laut dan pesisir, tetapi juga potensi pengembangan lainnya seperti bioekonomi, bioteknologi, energi baru terbarukan berbasis laut, hingga penguatan riset dan edukasi. Pengembangan *blue economy* sangat penting untuk memandu dan mendukung implementasi pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi global, pembangunan sosial, dan juga konservasi lingkungan.

Implementasi *blue economy* dapat membantu dalam pengendalian krisis iklim melalui beberapa cara berikut. Pertama, pengurangan emisi karbon dengan mendorong penggunaan energi terbarukan seperti energi angin laut dan energi gelombang. Penggunaan energi terbarukan ini dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Kedua, *blue economy* berfokus pada pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Melalui praktik-praktik pengelolaan yang bijaksana, seperti penetapan kawasan konservasi laut dan penangkapan ikan yang berkelanjutan, *blue economy* dapat membantu menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem laut yang berperan penting dalam menyerap karbon dan mengatur iklim global.

Ketiga, *blue economy* juga melibatkan peningkatan ketahanan pesisir terhadap perubahan iklim dan peningkatan risiko bencana. Dengan membangun infrastruktur yang tahan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut, *blue economy* dapat membantu masyarakat pesisir dan ekosistem pesisir untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Keempat, berupa inovasi teknologi dan penelitian. *Blue economy* mendorong inovasi dalam teknologi dan penelitian untuk mengatasi tantangan perubahan iklim dan berkontribusi pada upaya pengendalian krisis iklim. Melalui pengembangan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, serta penelitian tentang dampak perubahan iklim dan strategi mitigasinya.

2023

Minggu ke-1 Juli
(3 s.d. 9 Juli 2023)

Isu Sepekan

Bidang Ekuinbang, Komisi IV

Masyarakat pesisir, khususnya nelayan, mempunyai arti penting dalam implementasi *blue economy*. Dengan adanya pengaturan kuota penangkapan ikan, pembatasan musim penangkapan, dan perlindungan terhadap habitat laut yang penting bagi keberlangsungan stok ikan, *blue economy* membantu menjaga ketersediaan sumber daya perikanan jangka panjang. Ini berarti bahwa nelayan dapat terus mengandalkan tangkapan ikan sebagai sumber mata pencarian mereka di masa depan. *Blue economy* mendorong nelayan untuk melakukan diversifikasi mata pencarian mereka. Selain dari penangkapan ikan, mereka dapat terlibat dalam kegiatan seperti budidaya ikan, pemeliharaan kerang, penangkapan udang, dan sektor pariwisata bari. Dengan demikian, terjadi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan nilai tambah. Secara keseluruhan, *blue economy* berperan penting dalam memberikan peluang, dukungan, dan kerangka kerja yang mendukung nelayan untuk menjalankan usaha perikanan yang berkelanjutan.

Dalam konteks ASEAN, Indonesia dapat berkolaborasi dengan negara tetangga untuk meluncurkan program-program pemberdayaan nelayan di kawasan ASEAN. Program ini mencakup pelatihan, bantuan teknologi, akses ke pasar, dan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Melalui inisiatif ini, Indonesia dan berbagai negara dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembangunan *blue economy* di kawasan sekaligus menciptakan nelayan yang tangguh dalam menghadapi krisis iklim.

Atensi DPR

Peran *blue economy* diyakini akan terus meningkat di masa mendatang, seiring dengan pelaksanaan Visi Indonesia 2045: Ekonomi Biru untuk Perikanan Indonesia. Potensi *blue economy* Indonesia bukanlah sekadar jargon, melainkan serangkaian langkah nyata yang dapat ditempuh dengan kapasitas dan target yang ingin dicapai oleh Indonesia. Komisi IV DPR RI, melalui fungsi pengawasan, dapat memastikan agar strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam penerapan *blue economy* berjalan sebagaimana seharusnya. Strategi tersebut adalah memperluas kawasan konservasi laut; menerapkan penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan budidaya ikan baik di laut, pesisir, dan di pedalaman, secara berkelanjutan; pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan pengelolaan sampah plastik di laut. KKP juga diharapkan menjaga secara ketat kawasan konservasi mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan terus melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan agar mendapatkan akses yang lebih baik terhadap sumber daya, pembiayaan, dan peluang bisnis.

Sumber

antaranews.com, 3 Juli 2023;
bappenas.go.id, 4 Juli 2023;
belitongekspres.disway.id, 4 Juli 2023;
Media Indonesia, 5 Juli 2023;
worldbank.org, 25 Maret 2021.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

EDITOR

LAYOUTER



@anlegbkofficial

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetyawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.